

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap *budgetary slack* dengan *job relevant information* sebagai variabel moderating dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap *budgetary slack*. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,094 lebih besar dari 0,05.
2. *job relevant information* tidak mampu bertindak sebagai variabel moderating yang memperkuat pengaruh hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap terjadinya *budgetary slack*. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi saat interaksi yaitu 0,188 lebih besar dari 0,05

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran bahwa :

1. Sampel yang digunakan penelitian ini hanya 35 orang responden, maka penelitian selanjutnya diharap dapat menambah sampel agar dapat memperoleh hasil penelitian yang tepat.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel partisipasi anggaran dan *job relevant informasi* sebagai variabel yang mempengaruhi timbulnya *budgetary slack*. Maka untuk penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel moderasi lain seperti komitmen organisasi (Siti Pratiwi Husain, 2011), asimetri informasi (Rukmana, 2013), dan pertimbangan etika (Miyati, 2014).

C. KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang hanya menggambarkan penilaian responden, sehingga peneliti tidak bisa memastikan jawaban responden yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Sehingga mampu me nyebabkan data yang bias.
2. Jumlah sampel dalam penelitian ini sejumlah 35 responden namun karena kesibukan kerja dari responden dan keterbatasan waktu, peneliti hanya mampu mengumpulkan 30 data dari responden.

3. Penyebaran kuesioner hanya mampu dilakukan pada 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sleman yaitu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Perdagangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Karena kesibukan kerja dari responden, keterbatasan waktu penelitian dan keterbatasan dari peneliti sendiri.